

**RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN CALON DPRD KOTA MATARAM
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS
REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Oleh:

JAILAN AKBAR AHMAD

NIM. 2019B1D070

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

TAHUN 2024

LEMBARAN PERSETUJUAN

**RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN CALON DPRD KOTA MATARAM
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS
REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG)**

Oleh:

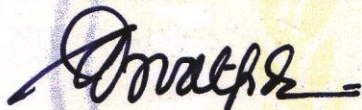
JAILAN AKBAR AHMAD

NIM. 2019B1D070

Untuk Memenuhi Syarat Ujian Akhir
Pada Tanggal 22 Januari 2024

Menyetujui Pembimbing

Dosen Pembimbing I



Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP

NIDN. 08160757902

Dosen Pembimbing II



Hidayatullah, S. IP., M. IP

NIDN. 0809038902

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Yudhi Lestahata, S IP., M. IP

NIDN. 0827118801

LEMBAR PENGESAHAN

**RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN CALON DPRD KOTA MATARAM
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS
REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG)**

Oleh:

JAILAN AKBAR AHMAD

NIM. 2019B1D070

Telah Dipertahankan di Depan Penguji
Pada Tanggal 22 Januari 2024
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Kelulusan

Tim Penguji

1. **Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP**

NIDN. 08160757902



Penguji Utama

2. **Hidayatullah, S. IP., M. IP**

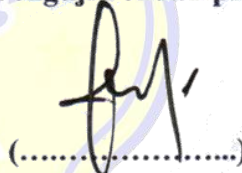
NIDN. 0809038902



Penguji Pendamping

3. **Dr. Rossi Maunofa Widayat, S. IP., MA**

NIDN. 0825118501



Penguji Netral

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801

PERNYATAAN ORISINALITAS SLRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwasannya sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik baik di UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM maupun di perguruan tinggi lainnya dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2023, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Mataram, 22 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Jailan Akbar Ahmad
NIM. 2019B1D070



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAILAN AKBAR AHMAD
NIM : 2019B10070
Tempat/Tgl Lahir : Temba Lajar, 23 September 2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp : 081337651755
Email : jailanajay0@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN CALON DPRD KOTA MATARAM PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS REKRUTMEN
CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 283

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikain surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

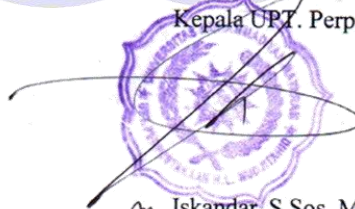
Mataram, 22 FEBRUARI 2024

Penulis



JAILAN AKBAR AHMAD
NIM. 2019B10070

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



M. Iskandar, S.Sos., M.A. udy
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAILAN AKBAR AHMAD
NIM : 2019B10070
Tempat/Tgl Lahir : Temba Lajar, 23 September 2000
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 081337651755 / jailanajay0@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN CALON DPRD KOTA MATARAM PADA
PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS REKRUTMEN
CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22 FEBRUARI 2024
Penulis



JAILAN AKBAR AHMAD
NIM. 2019B10070

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, maka ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah”



PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA TERHEBAT SAYA, FIGUR CINTA TANPA SYARAT YANG SELALU MENDO'AKAN YANG TERBAIK UNTUK ANAKNYA JAILAN AKBAR AHMAD, TERUNTUK AYAH AHMAD ISMAIL, IBU ROSNAWATI DAN KAKAK SALMAN AHMAD, KAKAK MARDIYAH AHMAD, KAKAK IPAR PEREMPUAN NIRMAWATI, KAKAK IPAR LAKI FAISAL, KAKAK WAHYUDIN AHMAD, ADIK KHAFLATUN NAZIRAH AHMAD, PONAKAN ALDIANSYAH AHMAD DAN PONAKAN EL. TERIMA KASIH ATAS BANTUAN SERTA DUKUNGAN SEHINGGA SAYA BISA MENYELESAIKAN SKRIPSI INI, TERUNTUK TEMAN-TEMAN DAN SEGALA PIHAK YANG TIDAK BISA SAYA SEBUTKAN SATU PERSATU TERIMA KASIH ATAS SEGALA BANTUAN YANG DIBERIKAN TERHADAP SAYA PRIBADI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Drs. Abdul Wahab, M. A. beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M. Si.
3. Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Dr. Rossy Munofa Hidayat, S. IP., M. IP.
4. Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram Bapak Amin Saleh, S. Sos, M. I. Kom.
5. Bapak Yudhi Lestanata S. IP., M. IP Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Bapak Hidayatullah, S. IP., M. IP Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
7. Bapak Ayatullah S. IP., M. IP Selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
8. Bapak Hidayatullah S. IP., M. IP Selaku Dosen Pembimbing II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
9. Teruntuk semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Mataram, 22 Januari 2024

Jailan Akbar Ahmad

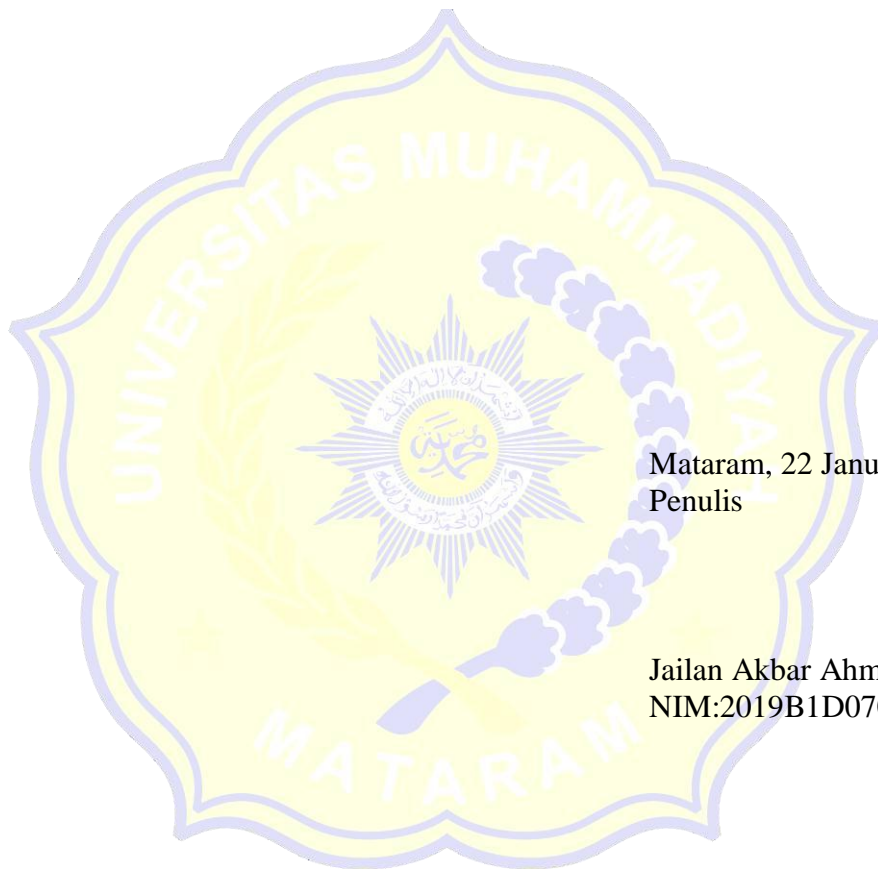
KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul. “Relasi Kuasa Dalam Rekrutmen Calon DPRD Kota Mataram Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024” (Studi Kasus Rekrutmen Calon Legislatif Partai Bulan Bintang) bisa diselesaikan, skripsi ini ditulis guna memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pada penyelesaian skripsi ini penulis menyadari banyak mendapatkan bantuan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai kalangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Drs. Abdul Wahab, M. A selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H. Muhammad Ali, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Yudhi Lestanata, S.IP, M.IP selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Pembimbing I: Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP yang telah memberikan pengajaran, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pembimbing 2: Hidayatullah, S.IP., M.IP. yang sudah memberikan banyak bimbingan dan arahan dalam penulisan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya.
6. Terkhusus kedua orang tua, Bapak Ahmad Ismail dan Ibu Rosnawati yang selalu memberikan do“a dan dukungan sekaligus figur cinta tanpa syarat serta penyemangat serta motivasi hidup sehingga skripsi ini diselesaikan dengan baik.
7. Para Dosen yang tentunya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang tidak pernah bosan membagi pengalaman dan ilmu pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.

Bahwa penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu harapannya, kritik, saran dan nasehat yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan. Penulisan karya ilmiah ini semoga bisa bermanfaat untuk semua pihak agar dapat dijadikan sebagai acuan pengembangan di dunia politik dan pendidikan.



Mataram, 22 Januari 2024
Penulis

Jailan Akbar Ahmad
NIM:2019B1D070

**RELASI KUASA DALAM REKRUTMEN CALON DPRD KOTA MATARAM
PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 (STUDI KASUS
REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI BULAN BINTANG)**

Jailan Akbar Ahmad, Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. Hidayatullah, S.IP., M.IP.

Oleh :

Jailan Akbar Ahmad

ABSTRAK

Pemilihan umum legislatif 2024 merupakan ajang merekrut bakal calon legislatif (Caleg) diusung oleh berbagai partai politik untuk calon sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa bakti 2024-2029. Sebelum bakal calon anggota legislatif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, partai politik menyeleksi persyaratan administrasi legalitas dari penilaian ijazah, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum. Kemudian relasi kuasa secara umum yakni hubungan yang terbentuk antara para pemeran tertentu dengan mempunyai stakeholder pada tingkat kekuasaan berbeda-beda. kekuasaan yakni hubungan atau relasi bahwa otoritas dari seseorang yang berkaitan ada dampak baginya. Definisi kekuasaan semua tergantung cara publik menilai. Apabila politik diartikan negara dan hukum, maka kekuasaan diraih dengan menguasai negara, kalau politik sebagai hajatan bersama, kekuasaan adalah power seseorang atau kelompok agar mempengaruhi keadilan umum. Kekuasaan merupakan tentang praktik-praktik konkrit yang bisa menghasilkan fakta dan pola-pola tindakan, menghasilkan wilayah objek-objek pengetahuan serta ritual kebenaran yang khas. Maka lewat penerapan itu menghasilkan norma-norma yang direproduksi serta dilegitimasi lewat para pihak yakni guru, pekerja sosial, dokter, hakim, polisi dan administrator. Contohnya kekuasaan menghadirkan diri pada pengetahuan, melainkan kekuasaan juga lantas melahirkan otoritas. Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yakni penelitian berdasarkan filsafat *postpositivisme* digunakan agar peneliti dianalisis data berkarakter induktif/kualitatif serta hasilnya lebih menonjol makna daripada generalisasi. Dalam penelitian jumlah informan penelitian sebanyak 4 orang. Melalui aspek relasi kuasa dominasi, permainan strategi dan pikiran pada rekrutmen calon legislatif tahun 2024 oleh DPW PBB NTB di kota Mataram yang dilakukan dari peneliti maka bisa disimpulkan sebagai berikut, dengan jumlah peserta bakal caleg yang mendaftarkan diri menjelang pemilu 2024 sebanyak 40 orang, akan tetapi yang lolos hanya 27 dan yang tidak lolos sejumlah 14 orang, maka bagi peserta yang lolos mereka mempunyai relasi kuasa yang disampaikan diatas dengan pihak partai maka memudahkan mereka untuk lolos pencalonan.

Kata Kunci: Relasi Kuasa, Rekrutmen, Partai

Kata Kunci : Relasi Kuasa, Rekrutmen, Partai

POWER RELATIONS IN THE RECRUITMENT OF CANDIDATES FOR THE MATARAM CITY LEGISLATURE IN THE 2024 LEGISLATIVE GENERAL ELECTION (A CASE STUDY OF THE RECRUITMENT OF LEGISLATIVE CANDIDATES FOR THE STAR MOON PARTY)

Jailan Akbar Ahmad, Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP. Hidayatullah, S.IP., M.IP.
By:

Jailan Akbar Ahmad

ABSTRACT

The 2024 legislative general election is an event to recruit legislative candidates (Candidates) promoted by various political parties for candidates as members of the House of Representatives, the Regional House of Representatives for the 2024-2029 service period. Before the legislative candidates are submitted to the General Election Commission, political parties select the legality administrative requirements from the assessment of diplomas, health, and legal clearance. Then power relations in general are relationships formed between certain actors with stakeholders at different levels of power. power is a relationship or relationship that the authority of someone related has an impact on him. The definition of power all depends on how the public assesses. If politics is defined as the state and law, then power is achieved by controlling the state, if politics is a collective celebration, power is the power of a person or group to influence public justice. Power is about concrete practices that can produce facts and patterns of action, produce areas of knowledge objects and distinctive rituals of truth. Through these practices, norms are reproduced and legitimized through teachers, social workers, doctors, judges, police and administrators. For example, power presents itself in knowledge, but power also produces authority. This research methodology uses qualitative research, namely research based on the philosophy of postpositivism used so that researchers analyze inductive / qualitative character data and the results are more prominent meaning than generalization. In the research, the number of research informants was 5 people. Through aspects of power relations over the body in the recruitment of legislative candidates in 2024 by the DPW PBB NTB in Mataram city conducted by researchers, it can be concluded as follows, the existence of power relations over the body by using a kinship approach from internal party administrators at the DPW PBB NTB in Mataram city during the recruitment of legislative candidates in 2024, with the number of prospective candidates who registered themselves ahead of the 2024 election as many as 40 people, but only 27 passed and 14 did not pass, but for participants who passed they had a relationship with the party, making it easier for them to pass the nomination.

MENGENALAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM



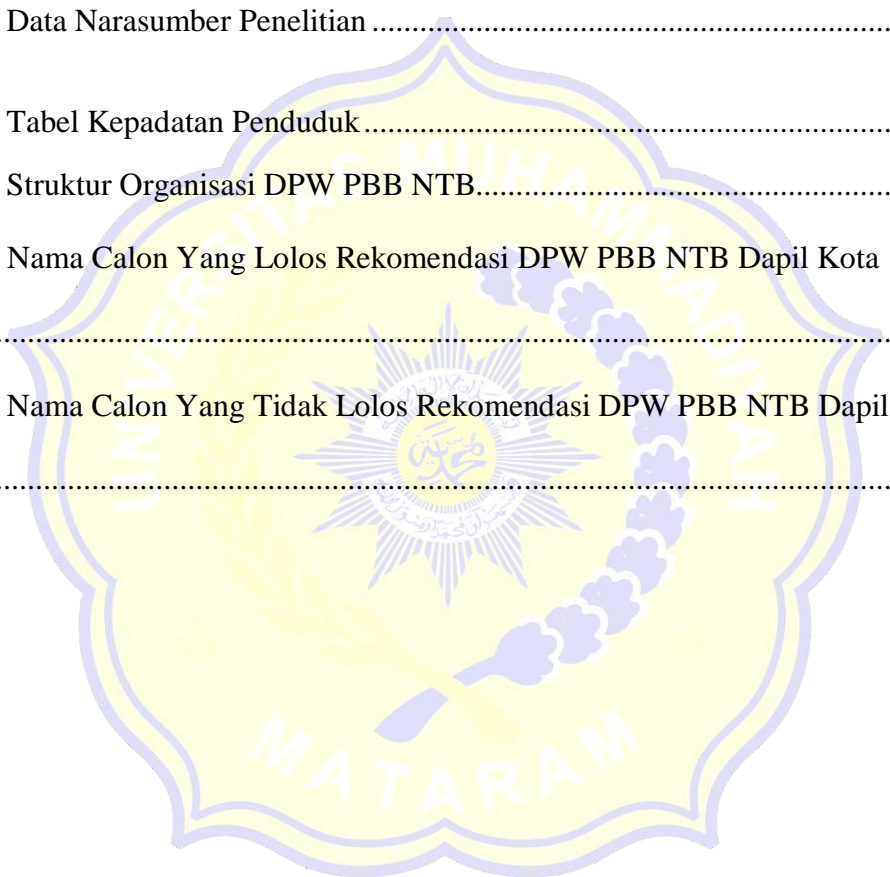
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL...	i
LEMBAR PERSETUJUAN...	ii
LEMBAR PENGESAHAN...	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI...	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME...	v
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI...	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Tinjauan Teori.....	18
2.2.1 Tinjauan Tentang Relasi Kuasa.....	19
2.2.2 Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik.....	28

2.2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik.....	38
2.2.4 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum.	40
2.3 Kerangka Berpikir.....	42
2.4 Definisi Konseptual.....	42
2.5 Definisi Operasional.....	44
2.5.1 Realasi Kuasa Dominasi.....	44
BAB III METODELOGI PENELITIAN	45
3.1 Jenis Penelitian.....	45
3.3 Jenis Dan Sumber Data.....	45
3.4 Teknik Penentuan Informasi	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	49
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	52
4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	52
4.1.2 Visi Dan Misi DPW PBB NTB Kota Mataram.....	55
4.1.3 Struktur Organisasi.....	55
4.2 Hasil dan Pembahasan.....	57
4.2.1 Aspek-Aspek Relasi Kuasa.....	57
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa.....	58
4.2.3 Relasi Kuasa Permaianan Strategi.....	64
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
5.1 Kesimpulan.....	75
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
Tabel 3.1 Unit Analisa Data Primer.....	46
Tabel 3.2 Analisi Data Skunder.....	48
Tabel 3.3 Data Narasumber Penelitian.....	48
Tabel 4.1 Tabel Kepadatan Penduduk.....	54
Tabel 4.2 Struktur Organisasi DPW PBB NTB.....	56
Tabel 4.3 Nama Calon Yang Lolos Rekomendasi DPW PBB NTB Dapil Kota Mataram.....	69
Tabel 4.4 Nama Calon Yang Tidak Lolos Rekomendasi DPW PBB NTB Dapil Kota Mataram.....	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	42
------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan umum legislatif 2024 merupakan ajang merekrut bakal calon legislatif (Caleg) diusung oleh berbagai partai politik untuk duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masa bakti 2024-2029. Sebelum bakal calon anggota legislatif diajukan kepada Komisi Pemilihan Umum, partai politik menyeleksi persyaratan administrasi legalitas dari penilaian ijazah, kesehatan, maupun keterangan bebas hukum.

Sedangkan dalam peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 perubahan atas peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2013 bagian kesatu pasal 4 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia.

Selain itu, para calon anggota legislatif setia kepada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga tidak pernah dijatuhi pidana penjara, terdaftar sebagai pemilih, mengundurkan diri dari jabatan baik kepala daerah, pegawai negeri sipil anggota Tentara Nasional Indonesia anggota Kepolisian, yang paling utama ketika mencalonkan diri tidak boleh rangkap jabatan, dengan membuat surat pengunduran diri.

Kemudian relasi kuasa secara umum menurut Michael Foucault yakni hubungan yang terbentuk antara para pemeran tertentu dengan mempunyai

stakeholder pada tingkat kekuasaan berbeda-beda. Selain itu relasi kuasa terdapat kekuasaan pendekatan sosial yaitu aktor memiliki power guna merubah tindakan aktor lainnya. Maka kekuasaan memiliki dampak dalam membentuk suatu program atau agenda sesuai kepentingan para pihak sehingga ada perlawanan terhadap yang lain.

Kendati relasi kuasa menurut Ebyhara (2014: 12), kekuasaan yakni hubungan atau relasi bahwa otoritas dari seseorang yang berkaitan ada dampak baginya. Definisi kekuasaan semua tergantung cara publik menilai. Apabila politik diartikan negara dan hukum, maka kekuasaan diraih dengan menguasai negara, kalau politik sebagai hajatan bersama, kekuasaan adalah power seseorang atau kelompok agar mempengaruhi keadilan umum. .

Pendapat dari Roskin (2016: 7-8) dalam Kritik Terhadap Teori Kekuasaan Pengetahuan Foucault oleh Mangihut Siregar halaman 3. Kekuasaan adalah koneksi antara orang-orang dengan kemampuan individual agar bisa mempengaruhi orang lain mau melaksanakan kemauannya. Fungsi kekuasaan menjadi instrumen pembantu supaya menggapai tujuan. Jadi sebaik apapun tujuan yang diraih kalau tidak diimbangi kekuasaan guna mengimplementasi maka tujuan hanya sebagai angan-angan semata.

Dengan demikian Siregar (2021: 3) yakni kekuasaan bisa diraih dari berbagai cara, ada berupa paksaan dan tanpa paksaan, bentuk kekuasaan yang digapai dengan paksaan contohnya kudeta di negara Myanmar melalui penipuan Partai Nasional untuk Demoikrasi, dipimpin oleh Aung San Suu Kyi mulai 1

Februari 2021. Sedangkan tanpa paksaan yakni pemilihan umum, pengangkatan sesuai regulasi yang berlaku, bahwa kekuasaan yang berkuasa memerintah yang tidak berkuasa.

Membahas terkait kekuasaan, tentu diimplementasi melalui pengetahuan, pelaksanaannya dibentuk lewat produksi ilmu pengetahuan. Artinya ilmu pengetahuan menciptakan kekuasaan. Selain itu relasi kuasa adalah sebuah strategi keterkaitan antara kelompok satu dengan kelompok lain dengan berlandaskan kekuasaan serta saling mempengaruhi, (Iskandar, 2016).

Berkaitan dengan persiapan menjelang pemilihan umum, semua partai politik melakukan rekrutmen calon legislatif di setiap Dapil, salah satunya yakni dari Partai Bulan Bintang (PBB) melakukan praktik rekrutmen terhadap para peserta calon legislatif. Dimana para calon tersebut nantinya akan diberikan rekomendasi partai untuk didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjelang pemilu 2024 mendatang.

Maka dari itu adapun data calon legislatif dari Partai Bulan Bintang Dapil 1 kabupaten/kota Mataram, berikut nama-nama yang lolos direkomendasi oleh PBB dan sudah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum untuk persiapan pemilihan umum tahun 2024 kabupaten/kota Dapil kota Mataram dan Mataram Nusa Tenggara Barat yang direkomendasi oleh Partai Bulan Bintang yaitu, Aisyah Aryandani, Sri Harwati, Sri Harwati, H. Sadri, Imam Gazali, Muhammad Ridwan, S. Pd, Zulharbi Ridwan Asmadi, SP. (Data calon legislatif PBB wawancara pada tanggal 26 Mei 2023).

Bahwa nama-nama yang lolos diatas direkomendasi oleh PBB melalui wawancara secara langsung bersama Asmadi, SP, salah satu responden atas observasi awal dari peneliti, sistem rekrutmen calon legislatif tahun 2023 untuk pemilihan umum 2024 oleh PBB ada faktor relasi kuasa dominasi pikiran dan permainan strategi dari pengurus dalam melakukan rekrutmen calon legislatif dari pengurus partai, maka atas relasi kuasa dari dominasi pikiran serta permainan strategi itulah mempersulit bagi para caleg dalam mengikuti kompetisi politik pada pemilihan umum 2024. Melainkan memudahkan bagi calon-calon yang mempunyai relasi kuasa dominasi pikiran hingga permainan strategi bersama orang partai yang mudah mendapatkan rekomendasi partai tersebut. (Wawancara pada tanggal 26 Mei tahun 2023).

Rekrutmen calon legislatif dari PBB NTB sangat tidak efektif, dikarenakan pada praktiknya partai hanya merekrut calon melalui sosial media dan baliho, akan tetapi secara kenyataan dilapangan partai merekrut orang-orang yang dicalonkan atas relasi kuasa dominasi pikiran dan permainan strategi oleh pengurus partai, hanya saja ketika para calon direkomendasi dari partai maka dibuatkan Kartu Tanda Anggota (KTA), maka berdampak pada calon yang direkomendasi tidak paham dengan ideologi partai. (Wawancara pada tanggal 26 Mei 2023).

Proses rekrutmen Partai Bulan Bintang tidak semua persyaratan calon anggota legislatif dimusyawahkan secara universal, melainkan persyaratan anggota parlemen selama ini hanya dibicarakan pada tingkat pimpinan partai

masing-masing. Maka berdampak terhadap mayoritas calon legislatif dapat dipilih oleh para pemangku jabatan di partai dengan memanfaatkan kepentingan individu dan memilih bagi calon yang akan di rekomendasikan sesuai kepentingan relasi kuasa dominasi pikiran dan permainan strategi pimpinan partai.

Permasalahan diatas menawarkan peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang relasi kuasa dalam rekrutmen calon anggota legislatif di PBB, data dari PBB wawancara tanggal 26 Mei 2023, berikut jumlah yang mendaftarkan diri sebagai calon legislatif di PBB untuk pemilu tahun 2024 bagi Dapil kabupaten/kota Mataram sebanyak 40 orang, yang lolos 26 orang dan yang tidak lolos 14 orang, penetapan calon legislatif oleh partai yakni dari relasi kuasa dominasi pikiran dan permainan strategi terhadap beberapa calon yang dilakukan oleh pihak partai sehingga dampaknya yang diloloskan hanya didominasi dari relasi kuasa pikiran dan permainan strategi internal partai dan menguntungkan bagi calon yang mempunyai relasi kuasa sesuai kriteria partai.

Berikut ada nama-nama calon anggota legislatif yang tidak lolos di Partai Bulan Bintang Dapil kabupaten/kota Mataram persiapan pemilu tahun 2024 diantaranya, Ahmad Yani, Dedy Pratama, Baiq Tria Annysumarjan, Rina Sudayanti, Baiq Rusmiati, Kudratin Swastri, Destya Royana, Nurti Sukaeni, H. Aslan, SE, Nur Zakiah, Mustika Nurrahmi, Regina Sengkey, Hani Sumayyah, Ir. Jayadi, bagi yang tidak lolos diatas imbas dari dominasi relasi pikiran dan permainan strategi pengurus partai maka sulit bagi mereka untuk lolos. (Wawancara bersama Asmadi, tanggal 26 Mei 2023).

Hal diatas menimbulkan pemasalahan terjadinya relasi kuasa pada rekrutmen yang sulit dari Partai Bulan Bintang dalam menuju kehidupan politik yang demokrasi, lebih khusus rekrutmen calon legislatif tingkat daerah yakni kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sebab gerakkan dari partai saat rekrutmen menyulitkan elemen masyarakat dalam mendapatkan informasi perekrutan, proses perekrutannya partai menggunakan relasi kuasa dominasi pikiran dan permainan strategi.

Selanjutnya salah satu hal menarik membahas terkait relasi kuasa perekrutan calon legislatif Partai Bulan Bintang di kota Mataram persiapan pemilu tahun 2024, karena tidak demokrasi dalam perekrutan, sekarang partai gencar melakukan proses rekrutmen calon anggota legislatif, atas kesadaran penulis ingin meneliti lebih jauh agar bisa mengetahui seperti apa prosedurnya, apakah perekrutan melihat figur dari sisi potensial baik ilmu pengetahuan, elektabilitas dan segi kepemimpinan dalam menjalankan tugas yang dimandatkan.

Dikarenakan selama ini banyak elemen masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang baik, pengalaman organisasi dan kualitas kepemimpinannya sudah teruji, hanya faktor adanya relasi kuasa dominasi pikiran dan permainan strategi saat rekrutmen calon legislatif yang dilakukan pengurus partai, hal itu membuat peluang untuk diberikan kesempatan agar direkom dari partai sangat minim, maka persoalan seperti ini yang menarik untuk dikaji karena tidak adanya keadilan bagi seluruh rakyat yang hidup di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi. Sebab yang ada ke demokrasi hanya dirasakan bagi segelintir kelompok.

Berdasarkan latar belakang diatas, banyak uraian permasalahan relasi kuasa pada rekrutmen calon anggota legislatif di kota Mataram tahun 2023 persiapan pemilu tahun 2024, peneliti tertarik untuk meneliti karena sedang ramai dibicarakan ditengah masyarakat menjelang pemilihan umum 2024, disini peneliti dengan merumuskan judul. “Relasi Kuasa Dalam Rekrutmen Calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 (Studi Kasus Rekrutmen Calon Legislatif Partai Bulan Bintang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas, sehingga bisa dirumuskan persoalannya yakni:

1. Bagaimana relasi kuasa pada rekrutmen calon DPRD Partai Bulan Bintang (PBB) pada pemilihan umum legislatif tahun 2024?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi relasi kuasa pada rekrutmen calon DPRD Partai Bulan Bintang pada pemilihan umum legislatif tahun 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan guna mengetahui tentang relasi kuasa dalam rekrutmen calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Mataram pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (studi kasus rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang).

2. Penelitian ini agar mengetahui secara mendalam tentang relasi kuasa dalam rekrutmen calon Dewan Perwakilan Mahasiswa Daerah kota Mataram pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (studi kasus rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang).

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini adapun harapannya sebagai penulis yaitu adalah sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini harapannya bisa menghasilkan ilmu pengetahuan lebih utama bagi penulis sehingga dapat menghasilkan informasi serta referensi bacaan terhadap semua kalangan yang memerlukannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberikan dampak positif bagi orang banyak tentang judul penelitian yang diambil oleh penulis. Oleh karena itu penelitian akan memberikan pengetahuan yang baru terhadap elemen masyarakat yang belum mengetahui secara jelas terkait relasi kuasa dalam rekrutmen calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Mataram pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (studi kasus rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang).

b. Bagi Peneliti

Tentu penelitian ini guna menambah wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman terkait relasi kuasa dalam rekrutmen calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Mataram pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (studi kasus rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang).



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini berdasarkan pada penelusuran pustaka yang dilakukan oleh penulis, sehingga mendapatkan berbagai penelitian yang membincang terkait relasi kuasa dalam rekrutmen calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Mataram pada pemilihan umum legislatif tahun 2024 (studi kasus rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang) yakni diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian dalam bentuk tesis oleh Zaki Ma'ruf (2022) dengan judul Relasi Relasi Kuasa Modalitas dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Relasi Kuasa Modalitas dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah Dalam Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2020). Bahwa pasangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah bisa menang dalam Pilkada serentak pada tahun 2020 di Kabupaten Sumenep, melekatnya fanatik simbol agama pilihan terhadap partai politik dengan berjalannya waktu banyak kader partai terseret kasus korupsi. Maka timbul suatu pandangan bahwa semuanya sama, baik yang ideologi islam atau nasionalis berkesempatan untuk korupsi. Berdampak bukan hanya bergesernya pikiran masyarakat untuk citra parpol dalam kemenangan Achmad Fauzi dan Dewi Khalifah sebab menggunakan strategi gotong royong. Achmad Fauzi mengkonversi antara modal politik dan sosial menjadi power ekonomi yang besar.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Adi Samzul, Muhammad, Ariana Yunus, Abd. Rahman Makkatuo Mulawammans, dalam bentuk Jurnal Ilmu Budaya yang berjudul, Relasi Antar Anggota Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Parigi Moutong Terhadap Pengambilan Keputusan. Adanya konflik internal yang terjadi didalam fraksi partai Demokrat kabupaten Parigi Moutong yakni pada pembentukan fraksi di DPRD tidak sesuai yang diinginkan. Terjadinya permasalahan itu faktor persoalan internal partai Demokrat menjelang Pilkada kabupaten Parigi Moutong tahun 2018. berdampak kepada relasi antar anggota fraksi partai Demokrat di DPRD pertama kali diganti ketua DPC, berimbas keharmonisan komunikasi antar sesama anggota fraksi terhambat untuk menyalurkan aspirasinya. Apalagi Bupati yang terpilih pada Pilkada tahun 2018 bukan rekomendasi dari partai Demokrat, khususnya daerah konstituen partai Demokrat segala bentuk aspirasi tidak begitu diperhatikan oleh pihak bupati.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Swadesta Aria Wasesa bentuk skripsi yang berjudul Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari tahun 2013 pada kesimpulannya relasi kuasa dalam novel Entrok karya Okky Madasari yaitu ada dua relasi kuasa dari pemikiran serta relasi kuasa atas tubuh. Kalaupun relasi kuasa dari pikiran seperti stigmasasi, dominasi, kontrol dan manipulasi. Sedangkan relasi kuasa atas tubuh sosial serta seksual yakni obyektifitas, dominasi, kontrol dan manipulasi. Adanya perlawanan kepada perwakilan perlawanan kuasa. Perlawanan itu dilaksanakan dari lima representasi kuasa diantaranya. Negara dan representasi kuasa adalah KTP

dan Undang-Undang, Budaya, yakni perlawanan budaya patriarki serta budaya tinggi seperti wayang dan gambyong. Lembaga, melawan wacana medis rumah sakit dengan tidak berobat ke rumah sakit, industri, melawan politik ruang penciptaan ruang mobil *pickup* 99100. Agama, melawan representasi kuasa ayat Al-Qur'an.

4. Penelitian dari Besty Anindya Nur Azni bentuk skripsi dengan judul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif, Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pola rekrutmen yang berbeda dari calon anggota legislatif daerah Istimewa Yogyakarta antara partai Gerindra dan PAN. Adapun berbagai perbedaan cara rekrutmen calon anggota legislatif partai GERINDRA dan PAN antara lain. PAN lakukan seleksi awal bacaleg usai daftar menggunakan strategi membuat visi misi berbentuk paper, terkait penilaian paper dijadikan acuan bacaleg lolos atau tidak di daftar calon sementara. Kalaupun partai GERINDRA seleksinya dilakukan test kegerindraan, wawancara umum ketugasan dewan dan tes psikologis. PAN memanfaatkan media sosial untuk sosialisai perekrutan dan merekrut bacaleg yang kader sebab bacaleg PAN harus lebih awal melakukan kerjasama mendukung kemenangan partai. GERINDRA memakai website resmi di <http://partaigerindra.or.id>. Serta membuka informasi di media massa cetak dan elektronik.
5. Penelitian oleh Akbar Aziz Pratama berbentuk skripsi dengan judul Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019

Studi Pada Kabupaten Tanggamus tahun 2021 pada kesimpulannya. Pola rekrutmennya tidak mempunyai kriteria khusus terkait persyaratan umum agar menjadi calon legislatif. Partai Demokrat melaksanakan pola rekrutmen dengan seleksi terbuka, akan tetapi pola terbuka itu dilaksanakan kepada para anggota. Kalau rekrutmen pengurus dilakukan dengan cara tertutup. Pemilu legislatif tahun 2019 untuk penetapan Dapil bagi caleg-caleg menggunakan tertutup tanpa transparan, Dapil dari para caleg dialihkan oleh partai tidak sama pada Dapil aslinya. Hal itu menjadi bagian faktor tidak ada satupun caleg partai Demokrat yang berhasil menduduki kursi DPRD kabupaten Tanggamus. Sistem rekrutmen politik internal mempunyai cara yang berbeda kepada pengurus dilandaskan kekerabatan. Rekrutmen calon legislatif dilakukan secara terbuka, penerimaan anggota tanpa dilihat dari segi kedudukan, status dan kekayaan, perekrutannya dilaksanakan dua pola yakni melalui online ataupun para calon bisa mendatangi kantor DPC partai Demokrat. Partai Demokrat rekrutmennya difokuskan terhadap sosok tokoh. Walaupun seperti demikian masih tidak bisa menambah suara partai di masing-masing Dapilnya.

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Identitas penelitian/penulis	Judul	Hasil
1.	Zaki Ma'ruf (2022)	Relasi Modalitas dan Kekuasaan (Studi Terhadap Kuasa dan Politik Terhaap	Pilkada kepala daerah tahun 2020 kabupaten Sumenep dilakukan pada 9 Desember 2020. Pilkada

		<p>Kemenangan Achmad Fauzi-Dewi Khalifah Dalam Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2020)</p>	<p>serentak kali ini ada dua kandidat calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yakni calon nomor urut satu Achmad Fauzi Dew Khalifah yang direkomendasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dengan total kursi di DPRD sebanyak 20 dari 50 kursi. Kalaupun kandidat calon nomor urut dua Fattah Jasin-Ali Fikri Warits yang dicalonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Nasional Demokrasi, Partai Hati Nurani serta partai pendukung yaitu GOLKAR jumlah kursi di DPRD 30 dari 50 kursi.</p>
2.	<p>Fikri Adi Samzul, Muhammad Ariana Yunus, Abd. Rahman Makkatuo Mulawarman (2022)</p>	<p>Relasi Antar Anggota Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Parigi Moutong Terhadap Pengambilan Keputusan</p>	<p>Terkait relasi anggota pada fraksi Demokrat periode 2014-2019 diawali saat pemilihan legislatif 2014 ditetapkan dari KPU, penetapannya terbagi menjadi lima anggota, untuk legislatif dari Demokrat, lalu membuat fraksi Demokrat dan dinahkodai oleh Abdul Haris Lasimpara. Kedudukan Haris Lasimpara selaku pimpinan fraksi partai Demokrat di DPRD begitu berpengaruh saat melaksanakan tupoksinya.</p>

			Posisi fraksi dinilai penting sebab perpanjangan parpol selain berjuang mengaspirasikan rakyat, hingga kepentingan partai.
3.	Swadesta Aria Wasesa (2013)	Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari (2013)	Dalam relasi kuasa pada novel Entrok karya Okky Madasari mendapatkan dua temuan yakni sebagai berikut. Relasi kuasa kepada pemikiran dan relasi kuasa terhadap tubuh. Relasi kuasa atas pemikiran merupakan stigmasasi, manipulasi, pengontrol, dan dominasi. Kemudian tubuh yakni obyektifikasi, manipulasi, pengontrol dan dominasi. Sedangkan relasi kuasa sesuai teori dari Michael Foucault tergolong sebagai relasi dari pemikiran bisa dikelompokkan terbagi menjadi lima bagian. Yaitu diantaranya, budaya, agama, industri serta lembaga (rumah sakit, sekolah dan penjara) maka kelimanya bagian dari wadah penyebar kuasa.
4.	Besty Anindya Nur Azni (2014)	Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif (Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun	Dari masing-masing parpol mempunyai ciri budaya tersendiri serta tidak bisa disamakan dengan yang lain dan memiliki kekhasan tersendiri. Untuk partai

		2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta	GERINDRA, PAN adalah kedua partai memiliki latar belakang yang berbeda akan tetapi sama-sama partainya terdaftar sebagai peserta pemilu tahun 2014.
5.	Akbar Aziz Pratama (2021)	Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 (Studi Pada Kabupaten Tanggamus)	Perolehan suara berdasarkan pemilu anggota DPRD Kabupaten Tanggamus tahun 2014 partai Demokrat dengan perolehan suara 29.018, Dapil I 1, Dapil II 1, Dapil III 1, Dapil IV 1, Dapil V 1 maka perolehan kursi 5. Teruntuk pemilu tahun 2019 partai Demokrat peraihan suara 15.005, Dapil I -, Dapil II -, Dapil III -, Dapil IV -, Dapil V -, perolehan kursi 0.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah dipaparkan diatas, terdapat berbagai persamaan dan perbedaan terkait penelitian terdahulu bersama penulis yakni diantaranya.

1. Pertama, penelitian tesis berjudul Relasi Kuasa Modalitas dan Kekuasaan Politik (Studi Terhadap Kemenangan Achmad Fauzi Dewi Khalifah Dalam Pilkada Kabupaten Sumenep Tahun 2014) dari Zaki Ma'ruf 2022. Metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, adapun perbedaan dalam penelitian ini berada di lokasi penelitian, penulis mengambil penelitian di kantor DPD Partai Bulan Bintang kota Mataram Nusa Tenggara Barat,

kendati Zaki Ma'ruf meneliti Relasi Kuasa pada Pilkada serentak di kabupaten Sumenep Jawa Timur. Persamaannya yakni sama-sama meneliti terkait Relasi Kuasa dan Kekuasaan Politik.

2. Selain itu penelitian jurnal ilmu budaya yang berjudul Relasi Antar Anggota Fraksi Partai Demokrat Periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Parigi Moutong Terhadap Pengambilan Keputusan oleh Fikri Adi Samzul, Muhammad Ariana Yunus, Abd. Rahman Makkatuo Mulawarman 2022. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk perbedaannya pada penelitian terdahulu berbicara Relasi Antar Anggota Fraksi Partai Demokrat Terhadap Pengambilan Keputusan sedangkan penulis hanya membahas Relasi Kuasa Dalam Rekrutmen Calon DPRD. Berbicara persamaannya sama-sama berbicara tentang relasi dalam partai.
3. Selanjutnya penelitian skripsi oleh Swadesta Aria Wasesa yang berjudul Relasi Kuasa Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari tahun 2013. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya adalah peneliti terdahulu meneliti terkait relasi kuasa dalam novel entrok. Sedangkan persamaannya sama-sama berbincang tentang relasi kuasa.
4. Berikutnya penelitian skripsi oleh Besty Anindya Nur Azni dengan judul Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif, Studi Komparasi Antara Partai Amanat Nasional Dengan Partai Gerakan Indonesia Raya Tahun 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaannya penelitian terdahulu bersama penulis adalah lokasi penelitian terdahulu di Yogyakarta dan membahas tentang perbandingan (komparasi)

partai PAN dan GERINDRA walaupun penulis di kota Mataram NTB. Bentuk dari persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang rekrutmen calon anggota legislatif.

5. Penelitian skripsi dari Akbar Aziz Pratama yang berjudul Rekrutmen Politik Partai Demokrat Dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 Studi Pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2021. Metode penelitian terdahulu ini menggunakan pendekatan kualitatif. Terkait perbedaannya antara penelitian terdahulu dan penulis yakni penelitian terdahulu berbicara tentang rekrutmen politik partai sedangkan penulis membahas rekrutmen calon DPRD pada pemilu 2024. persamaannya adalah sama-sama membahas terkait rekrutmen.

2.2. Tinjauan Teori

Untuk penelitian ini, terkait tinjauan pustaka yang digunakan merupakan teori-teori yang akan dijadikan acuan pada penelitian, selain dari itu kajian pustaka melalui skripsi, jurnal-jurnal penelitian baik nasional bahkan internasional.

2.2.1 Tinjauan Tentang Relasi Kuasa

1. Relasi Kuasa

Foucault (2013: 16) dalam pandangannya mendefinisikan relasi kuasa adalah konsep keterkaitan kekuasaan yakni praktik-praktik otoritas dari pada subyek ke obyek melalui beberapa media serta wujud kekuasaan yang tidak bisa diraih dari cara-cara represif, Kekuasaan merupakan tentang praktik-praktik konkrit yang bisa menghasilkan fakta dan pola-pola tindakan, menghasilkan wilayah objek-objek pengetahuan serta ritual kebenaran yang khas. Maka lewat penerapan itu menghasilkan norma-norma yang direproduksi serta dilegitimasi lewat para

pihak yakni guru, pekerja sosial, dokter, hakim, polisi dan administrator. Contohnya kekuasaan menghadirkan diri pada pengetahuan, melainkan kekuasaan juga lantas melahirkan otoritas.

Selain itu, menurut Foucault (2022:13) relasi kekuasaan yakni hubungan yang berupa praktik kekuasaan dari subyek ke objek dengan berbagai cara dengan kekuasaan yang ada. Maka hal itu dimaksudkan guna mendapatkan model suatu konsep tanpa cara yang mengekang maka dapat menciptakan seseorang menjadi taat tanpa ada paksaan.

Rohayati, Suherdi (2019 12). Relasi kuasa merupakan hubungan atau relasi bahwa kekuasaan hanya dimungkinkan dari seseorang yang saling berkaitan serta membawa pengaruh antara satu sama lain, hadir dari perbedaan antara kelompok satu dan kelompok lainnya, sedangkan untuk mendapatkan kekuasaan seseorang maupun kelompok harus bisa memposisikan dirinya dan memiliki power sehingga mampu mengubah kesadaran, cara pandang maupun tindakan orang lain.

Ebyhara (2019: 12. Apabila politik diartikan kedalam makna formal, kaitan negara dan hukum, kekuasaan diartikan sebagai kekuasaan negara dengan cara menguasai negara. Ketika politik dipandang sebagai hajat orang banyak, kekuasaan yaitu kemampuan seseorang atau kelompok agar bisa mempengaruhi kearifan umum melalui lembaga-lembaga. Instrumen mencapai wewenang melalui lembaga politik sehingga kekuasaan dijalankan memanfaatkan lembaga-lembaga politik yang ada.

Kekuasaan dari pemerintah menurut Rousseau (2022: 13) hadir atas kontrak sosial individu dalam masyarakat. (Negara dan Rusadi, 2020). Kontrak sosial ada keterkaitan khusus bagi mereka yang mempunyai kekuasaan serta yang diperintah, sering disebut “kekuasaan sebagai hubungan antara orang-orang”. Kekuasaan dan wewenang berbeda meskipun dianggap sama, kekuasaan yakni kemampuan mempengaruhi individu lain mengikuti keinginan penguasa.

Kekuasaan mempunyai fungsi sebagai instrumen dalam mendapatkan suatu tujuan. Weber (2022: 13) berpendapat kekuasaan adalah suatu kemungkinan untuk memaksakan orang lain supaya sesuai keinginannya. Weber memaparkan berbagai wewenang keterkaitan kekuasaan salah satunya kekuasaan (*Authority*) adalah kemampuan mendapatkan tujuan tertentu diterima secara formal oleh masyarakat dan wewenang dibangun atas legitimasi penguasa.

Miriam Budiardjo (2021: 89), pada kebiasaannya kekuasaan berbentuk hubungan. Artinya ada satu pihak tertentu yang memerintah serta bagian yang diperintah. Pihak satu memberi mandat perintah yang akan mengikuti arahan perintah, maka kesamaan kedudukan tidak ada yang sama disebabkan selalu yang posisinya lebih tinggi dari yang lain serta ada faktor paksaan dalam relasi kekuasaannya.

Perspektif Weber (2021: 3) bahwa kekuasaan berbeda dengan pengaruh, karena pengaruh adalah perwujudan dari suatu imbasnya perlakuan seseorang. Kekuasaan yakni kemampuan umum dari seseorang agar bisa mempengaruhi, untuk perbedaan lainnya yakni kekuasaan berfokus kepada power seseorang supaya mendapatkan atau membatalkan cita-cita pencapaian orang lain.

Selain itu Arts (2021: 3) konsep kekuasaan serta pengaruh saling berhubungan supaya dapat membedakan lewat praktik, kekuasaan nampak pada praktik pengaruh, walaupun praktik pengaruh dilaksanakan guna mempertahankan kekuasaan.

Selanjutnya Dahl (2021: 3), kekuasaan keterkaitan antara sepasang penyebab, kekuasaan berimplikasi kepada berbagai sanksi dan kalau pengaruh tidak ada sanksi. Sedangkan pengaruh adalah konsep umum walaupun otoritas yakni persoalan yang khusus.

Keberadaan Thomas (2016: 2) mengatakan relasi kuasa (*power relation*) merupakan hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya berlandaskan pemikiran tertentu, kekuasaan (*power*) yakni suatu konsep yang saling berhubungan dan abstrak yang dimana secara fakta mempengaruhi kehidupan mereka. Kekuasaan pun bisa didefinisikan menjadi bagian keunggulan para pemangku kepentingan supaya melawan ataupun mendukung personal dari kelompok lainnya.

Pendapat Max Weber dan Gramsci (2016: 6) Power kekuasaan semakin terlihat ketika diperhatikan dengan secara baik, pandangan mereka merupakan yang memfokuskan teori kekuasaan dalam masyarakat berbasis kelas yaitu, buruh, kelas, ekonomi dan sistem kapitalisme. Perspektif Marx pada kapitalis yaitu tenaga kerja dipaksa menjual tenaganya terhadap pihak kapitalis, yang membutuhkan tenaga agar mengumpulkan modal yang banyak.

Akan tetapi menurut Foucault (2016: 6) kekuasaan pada basis kelas tidak seutuhnya benar, karena otoritas bukan milik siapapun, melainkan kekuasaan ada

dimana-mana serta kekuasaan merupakan strategi, kekuasaan yakni praktik yang terjadi dalam sebuah ruang lingkup tertentu. Karena kekuasaan menandakan susunan, aturan serta relasi dari internal, kekuasaan bertautan pada pengetahuan yang hadir dari hubungan kekuasaan suatu objek. Kekuasaan menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan mewadahi kekuasaan, kekuasaan tidak selalu berbicara tentang penindasan dan represi, akan tetapi bisa lewat normalisasi serta regulasi.

Selanjutnya Foucault (2013: 17) menyampaikan otoritas disebarkan melewati relasi sosial, membuat tindakan misalnya seperti ada positif dan negatif serta menciptakan prosedur serta regulasi yang mampu menundukkan masyarakat. Lalu ada lima bagian ketika kekuasaan itu bekerja.

1. Kekuasaan tidak diambil, diperoleh atau dibagikan, kekuasaan berjalan dari berbagai titik pada relasi yang tidak setara serta selalu bergerak.
2. Kekuasaan bersifat cair, dalam maksudnya kekuasaan yakni dampak langsung atas pembagian, perbedaan, ketidaksetaraan serta ketidakseimbangan.
3. Hubungan kekuasaan tidak berada pada posisi suprastruktur, kekuasaan hadir dari bawah, maksudnya ada posisi biner antara yang lebih mendominasi serta dominan, relasi seperti itu berbentuk pada aparat produksi misalnya dalam keluarga, kelompok atau institusi.
4. Hubungan kekuasaan berkarakter internasional, maka tidak ada kekuasaan tanpa suatu sasaran, rasionalitas kekuasaan yakni teknis yang tertutup dalam posisi teratas.

5. Kekuasaan selalu menggapai tandingan dari kuasa lainnya saat dimanapun keberadaannya. Kekuasaan senantiasa menciptakan anti otoritas, jadi anti otoritas itu pada faktanya merupakan guna melaksanakan kekuasaan lain menjadi tandingannya.

Kefokusan kekuasaan menurut Foucault (2013: 17) sasarannya yaitu siapapun bisa, baik itu personal maupun kelompok. Relasi kuasa operasi dalam pemikiran sampai tubuh pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan diantaranya:

1. Relasi Kuasa Atas Pikiran

Foucault (2013: 21), salah satu cara yang baik yakni kita dapat meraih pengertian keseimbangan otoritas antara wacana-wacana berkompetisi dalam tautan tertentu yaitu dengan cara merefleksikan menggunakan bahasa guna membahas berbagai sesuatu. Karena bahasa bisa mengidentifikasi tubuh itu sering difungsikan dalam penggunaan tubuh atas sebuah keperluan.

Bergesernya keseimbangan dari kekuasaan wacana, Foucault (2013: 22), definisi perempuan semakin massif di masa modern, sedangkan laki-laki tidak bisa merasakan ninfomania (kondisi gangguan mental dengan perilaku seksual) tidak bisa menjadi laki-laki simpanan atau pelacur lelaki. Misalnya yakni rasisme. Kemampuan bahasa mempengaruhi pikiran personal yang menggolongkan manusia berasas kelas sosial ataupun kekhasan fisik yang dimiliki manusia.

Manusia dapat digolongkan menurut Foucault (2013: 22) diantaranya adalah dilaksanakan dengan wacana, wacana, baik itu berupa

bahasa langsung maupun teks yang lebih didominasi sebuah waktu pada histori serta sebuah tempat di dunia sampai manusia mempunyai kerangka pikir atau perspektif di dunia tertentu.

2. Bentuk Relasi Kuasa

Menurut Foucault (2013: 23) mendeskripsikan tentang regulasi tubuh politik serta pikiran. Otoritas berakar pada kekuasaan terhadap tubuh dan dalam berbagai aktivitas kecil mikroskopis tubuh, kekuasaan dengan sifat interdisipliner dengan secara fisik. Pembentukan kekuasaan pada tubuh fisik serta ilmu pengetahuan dipaksa melalui penyelewengan dari elemen, sikap dan tingkah laku. Setelah itu berwujud kontrol pemikiran dan tubuh yang terakhir yakni berwujud stigmatisasi.

Oleh karena itu Foucault (2017: 15) relasi kuasa berfokus terhadap totalitas struktur tindakan guna menunjukkan perilaku dari perseorangan yang merdeka. Kuasa dilaksanakan kepada mereka yang berada pada posisi guna memilih serta diarahkan supaya mempengaruhi pilihan mereka, selain itu Foucault membedakan antara relasi kuasa menjadi tiga bagian yakni:

1. Relasi kuasa menjadi dominasi (*domination*). Dominasi yaitu bentuk praktik otoritas yang berimplikasi menciptakan situasi dalam ranah pilihan tindakan subjek yang didominasi sangat terbatas. Dominasi mengarah kepada relasi kuasa yang bersifat asimetris didalamnya individual ter subordinasi mempunyai sedikit ruang guna bermanuver

sebab ruang kebebasan bagi mereka bertindak begitu terbatas. Sebab ada dampak atas kuasa.

3. Perlawanan Terhadap Representasi Kuasa

Sulistya (2011: 142) menyampaikan kekuasaan itu menyebar, kekuasaan bukan hanya dimiliki bagi seseorang yang pemangku jabatan dalam suatu negara. Selanjutnya Foucault (2013: 23), kekuasaan merupakan seperti uang logam, memiliki dua rupa yang berkebalikan, maksudnya yaitu kekuasaan berwajah ganda, kekuasaan mempunyai sifat restriktif sebab kekuasaan bisa membuat batasan agar menjauhi elemen lain bagi yang mengganggu kekuasaannya. Wacana tidak ada yang lebih dominasi leluasa tanpa oposisi pada wujud-wujud pengetahuan pesaing lainnya. Tetapi pada keadaan yang begitu luar biasa, resistensi kepada mayoritas definisi kebenaran dan kesalahan, baik dan buruk akan selalu hadir, maka secara khusus demikian dalam masyarakat modern wacana alternatif dipublikasikan serta dipromosikan menggunakan cara-cara umum yang ekstrim tanpa dikenal di masyarakat tradisional.

4. Media Penyebar Kuasa

Foucault (2013: 23) kekuasaan memerlukan instrumen ataupun media guna menyebarkan kuasanya, aturan kuasa terhadap tubuh dan pemikiran manusia dipublikasikan supaya mekanis manusia di tubuh dan pikirannya. Menyebarluaskan kekuasaan ada pada setiap sekot masyarakat. Yakni lewat lembaga, bengkel-bengkel kerja, sekolah,

keluarga dan barak sebagai subjek terhadap waktu, perilaku, tuturan. Media sebagai publikasi kuasa adalah usaha medikalisasi yang disebarluaskan melewati yakni sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan

Pendidikan Foucault (2013: 23) merupakan aspek dominasi atas dunia modern, mayoritas lembaga pendidikan sekolah yakni wadah terpopuler guna mendisiplinkan tubuh serta pikiran. Sebab teori pendidikan sering diberikan di sekolah berisikan tentang manajemen waktu agar disiplin tubuh-tubuh yang belum matang di lembaga sekolah. Pesantren dan institusi agama juga termasuk bagian dari lembaga pendidikan.

Foucault (2013: 24) anggota masyarakat bisa diurus atas pengetahuan agama, pengetahuan yang diberikan lewat institusi agama akan menjadi penentu baik buruk dan patuh serta tidak patuh tingkah laku masyarakat. Foucault juga memberikan contoh tentang seksualitas, karena rinsipnya dorongan seksual fisik bisa memuaskan dari berbagai cara kegiatan tubuh. Sewalaupun seperti itu, semua budaya sudah membangun regulasi terkait normalitas serta regulasi tentang suatu relasi seksual, agama pun bisa mengurus tubuh beraktivitas sesuai pada wacana didalamnya. Sehingga bisa melaksanakan sanksi kebenaran guna merefleksikan otoritas institusi ataupun agama tersebut.

2. Lembaga Kesehatan

Bagi Foucault (2013: 24) berbicara konsep sehat serta sakit pada kehidupan analog dengan dikotomi baik dan buruk. Oleh karena itu, manusia akan patuh pada kekuasaan definisi medis terkait normal serta menyimpang. Dibicarakan normal kalau keadaan tubuh tanpa merasakan gangguan, walaupun menyimpang ketika kondisi tubuh kurang baik maka rumah sakit sebagai wadah pemeriksaan kondisi fisik tanpa memperhatikan aspek lain, misalnya psikologis tubuh dimanipulasi serta diurus geraknya pada ruang tertentu sampai melahirkan bergantung terhadap dokter serta rumah sakit.

3. Bahasa

Foucault (2013: 25) manusia merupakan makhluk yang berbahasa, selaku linguis manusia menggunakan bahasa pada komunikasi keseharian pada ruang dimanapun keberadaannya. Dalam berbahasa sudah dibuat regulasi normatif yakni saat penggunaan bahasa di ruang-ruang tertentu. Bagian klaim membenaran sekaligus stigmasasi yakni mutlak ataupun bakunya bahasa dengan benar-salah dan baik buruk dibuat teratur. Persoalan itu yang akan menentukan perilaku dari pemapar bahasa.

4. Negara

Negara Foucault (2013: 26) pada konteks suprastruktur memegang peran penting dalam menyebar wacana selaku kekuasaan serta disiplin di tubuh. Negara selaku institusi menurut Foucault menciptakan regulasi-regulasi dan media penghukuman terhadap personal saat disebarkan

kekuasaan. Maka teknis mengondisikan manusia yakni dengan membuat sebuah sistem penjara yang akan mendisiplinkan tubuh serta pikiran agar patuh kepada negara. Dalam mengondisikan personal terbagi dalam empat prosedural, diantaranya distribusi ruang, time table, administrasi kumulatif dan komposisi konfigurasi tenaga. Distribusi ruang maksudnya mengalokasikan ruang agar personal tertentu mudah diawasi personal lain.

2.2.2 Tinjauan Tentang Rekrutmen Politik

Husna (2018: 15) bagian terpenting yang mempunyai partai merupakan pelaksanaan rekrutmen politik. Keberadaan partai bisa dilihat dari power partai dalam melakukan fungsinya. Sebab kalau tidak ada rekrutmen politik, partai politik tidak mempunyai anggota-anggota ataupun para tokoh yang dapat diandalkan dari beberapa agenda politik. Rekrutmen politik terbagi atas dua kata, yakni rekrutmen dan politik. Rekrutmen adalah dengan makna penyeleksian dan politik berarti kerjaan negara. Bisa disimpulkan kalau rekrutmen politik yakni proses menyeleksi rakyat guna melakukan urusan negara.

Rekrutmen politik Plano (2022: 19) merupakan proses dimana personal maupun kelompok-kelompok personal dilibatkan pada peran politik aktif, partai politik pada pelaksanaan seleksi menetapkan bakal calon yang direkomendasikan seharusnya kader yang betul-betul aktif, baik di masyarakat atau internal partai. Melainkan bukan yang hadir di waktu dilakukannya pemilihan umum, maka pengurus partai politik betul-betul selektif saat memilih calon yang direkomendasi.

Proses rekrutmen selaku pemilihan orang-orang guna peranan di sistem sosial. Kalaupun rekrutmen politik menunjuk saat mengisi kedudukan formal dan legal.

Field dan Siavelis (2022: 19) rekrutmen politik adalah fungsi yang begitu penting untuk partai politik. Saat melaksanakan fungsi rekrutmen maka dibutuhkan institusi maupun agen-agen tertentu berupa formal atau informal, partai politik adalah sebuah institusi formal melaksanakan rekrutmen pada momentum pengisian posisi jabatan politik. Fungsi rekrutmen politik sebagai fungsi eksklusif partai politik serta tidak mungkin ditinggalkan oleh parpol. Ia menjadi monopoli serta fungsi abadi partai politik. Pengorganisasi masyarakat luar partai politik tidak melakukan fungsi rekrutmen politik, disebabkan fungsi itu menjadi pembeda yang nyata antara partai politik dan bukan partai politik.

Ramlan Surbakti (2019: 18) rekrutmen politik sebagai penyeleksi serta pemilihan maupun pengangkatan individual ataupun kelompok orang guna melakukan banyak peran pada sistem-sistem politik dalam umumnya serta khususnya pemerintahan. Fungsi ini semakin pesat berkembang fungsinya ketika partai politik adalah partai tunggal, misalnya pada sistem politik otoriter, mayoritas partai di badan permusyawaratan rakyat sampai mempunyai wewenang agar membentuk pemerintahan di sistem politik demokratis, fungsi rekrutmen yakni fungsi mencari serta mempertahankan kekuasaan, kendati itu fungsinya begitu penting berlangsungnya parpol.

Cholisin (2018: 15) mengatakan yakni rekrutmen politik mencakup pemilihan, seleksi dan pengangkatan seseorang maupun kelompok orang supaya

melakukan mayoritas peranan pada suatu sistem politik yang umumnya serta pada khususnya pemerintah.

Ada berbagai pandangan dari para ahli Rush dan Atholf (2018: 15) definisi rekrutmen politik seperti yang disampaikan oleh para ahli diatas rekrutmen politik selaku proses yang dimana orang-orang menjamin mendaftarkan diri supaya bisa mendapatkan sebuah jabatan. Rekrutmen atau perekrutan adalah proses dua arah yang sifatnya bisa formal dan tidak.

Menurut Gabriel (2018: 16) bahwa setiap sistem politik memiliki cara tersendiri pada proses merekrut kadernya guna mendapatkan jabatan politik dan administrasi. Pandangan Mathis dan Jaksin (2018: 16) rekrutmen dalah proses yang mendapatkan sejumlah pelamar yang berkualifikasi di pekerjaan pada perusahaan atau organisasi. Rekrutmen yakni proses mencari, menemukan, mengajak dan menetapkan banyak orang baik dari dalam atau luar perusahaan maupun organisasi.

Menurut Durnette (2018: 16) pada teori rekrutmen ada tiga utama yakni: *Process variable* yaitu sebuah mekanisme pada psikologi atau ruang lingkup sudah dianggap sebagai hal penentu pencapaian pada berbagai metode rekrutmen. Setelah itu teori *independent variable* yakni berupa gambaran umum mengenai praktik rekrutmen. Terakhir sering disebut *dependent variable* adalah hasil pada proses rekrutmen.

Remon (2019: 20) salah satu fungsi partai politik merupakan rekrutmen politik. Fungsi itu mencakup seleksi, pemilihan, pengangkatan seseorang ataupun

kelompok orang guna melakukan berbagai peran di pemerintahan. Maka dari itu partai memerlukan kader-kader yang baik agar mengisi posisi jabatan di pemerintahan. Ketika memiliki kader yang baik partai bisa menentukan pemimpin sendiri serta memiliki peluang supaya bisa mengajukan calon di bursa otoritas lokal serta nasional.

Pada variable itu Husna (2018: 17) terbagi kedalam berbagai elemen. Independent variable adalah seperangkat regulasi, prosedur, keputusan-keputusan yang sudah dianggap bagian pada rekrutmen organisasi. Variable ini terbagi dalam tiga elemen yakni: recruiter (perekrut), recruitmen source (sumber rekrutmen) dan administrative (kebijakan administratif) dan prosedur.

Dalam praktiknya Husna (2018: 18) rekrutmen politik sering bermakna ganda. Yakni *pertama*, mengenai seleksi agar mendapatkan jabatan-jabatan politik yang sudah tersedia, misalnya anggota kepala negara, kepala daerah dan anggota legislatif. Rekrutmen politik dimanfaatkan supaya mempromosikan kader pimpinan partai agar mendapatkan kedudukan sentral di jabatan tertentu, rekrutmen politik berfungsi selaku jembatan yang mengkorelasikan antara rakyat dengan pemerintah.

Husna (2018: 18) bahwa proses rekrutmen politik di sebuah partai pada hakikatnya manifestasi atas dinamika dan demokratis internal partai tersebut, kehidupan partai yang demokratis dalam internal tentu demokratis juga proses rekrutmen tersebut. Cara rekrutmen politik adalah keharusan partai agar melaksanakan seleksi dan rekrutmen saat rangka mengisi posisi dan jabatan politik. Adanya rekrutmen politik dimungkinkan terjadi rotasi dan mobilitas

politik. Ketika tidak ada demikian maka muncul diktatorisme dan stagnansi politik.

Husna (2018: 19) rekrutmen politik memiliki peran yang sangat penting pada sistem politik sebuah negara. Disebabkan proses itu menjadi penentu siapa saja yang melaksanakan fungsi-fungsi sistem politik negara melewati lembaga-lembaga. Maka setiap partai mempunyai cara masing-masing pada pelaksanaan rekrutmen terlebih pada pelaksanaan sistem serta prosedur rekrutmen yang dilaksanakan partai.

Almond dan Powel (2019: 20) menyampaikan yakni terdapat dua sifat pada proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen tertutup, yaitu mekanisme pemilihan kandidat dari partai politik yang bisa menjadi penentu dari elit tertentu maupun sekelompok orang, yang mempunyai otoritas di partai politik, pemilihan rekrutmen tertutup selalu dianggap selaku pemilihan yang tidak demokratis sebab dilibatkan hanya sekelompok orang tanpa melibatkan jajaran partai secara menyeluruh.
2. Rekrutmen terbuka, merupakan mekanisme pemilihan calon yang dilaksanakan dengan demokratis serta melibatkan berbagai elemen internal partai secara terbuka, pemilihannya mengedepankan persamaan hak serta kewajiban yang diayomi dari Undang-Undang serta konstitusi.

Husna (2018: 17) beberapa langkah yang seyogyanya dilaksanakan sebelum rekrutmen yakni adalah manajemen organisasi, artinya yaitu mengetahui

secara benar apa yang diperlukan organisasi. Tentu organisasi pun harus mengetahui benar apa yang diperlukan organisasi tersebut. Adapun strategi rekrutmen yang dilaksanakan guna meraih hasil yang maksimal adalah:

1. Menyiapkan data komprehensif baru terkait tingkat keluar masuk anggota serta biaya rekrutmen dan keberhasilan retensi.
2. Menyusun model kompetensi.
3. Mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang kompetensi di jajaran organisasi termasuk gap (jarak) yang perlu diisi.
4. Menyusun posisi yang relevan secara akurat termasuk deskripsi jalur pembangunan karier.
5. Memiliki proses evaluasi kandidat teruji, kemerdekaan menuntut terhadap masyarakat supaya mengembangkan sistem kepartaian yang diharapkan bisa melayani tuntutan-tuntutan yang seperti pengembangan demokrasi, pembangunan politik dan lainnya.

Edinger (2018: 25) model-model rekrutmen politik diantaranya yaitu:

1. Model Barber

Terdapat tiga dimensi (variable) rekrutmen Barber yakni motivasi, sumber daya dan kesempatan. Imbasnya yaitu kumulatif mereka tidak bisa dikerjakan secara individual. Calon yang memiliki potensi butuh dimotivasi agar kader-kader pendukung, kader inti yaitu anggota pemula,

anggota madya, anggota muda, anggota dewasa, anggota ahli anggota puma, anggota kehormatan mencari posisi dan lainnya. Sumber daya bisa terdiri pada aset-aset fleksibilitas serta pekerjaan dan power guna pengorbanan finansial yang dibutuhkan.

2. Model Snowiss

Edinger (2018: 25) mengatakan model rekrutmen Snowiss yakni dengan catra sentralkan pada aspek-aspek relevan kepada keperluan organisasi, model Snowiss ada tiga variabel yakni:

Dasar sosial yakni partai adalah poin utama dibandingkan elekorat umum, sumber daya organisasi yang bisa dimanfaatkan sebagai insentif guna memobilisasi pekerjaan partai serta menarik para elit politik, material maupun non material, Struktur, hirarki, kepemimpinan tersentral, tidak bisa dipengaruhi oleh dunia luar, etos organisasi

3. Model Rush dan Atholf

Rush dan Athoff menyampaikan model rekrutmen politik mencakup lima proses agenda yakni: penyediaan dan permintaan, agensi, kriteria, kontrol dan tuntutan, daya penyediaan serta permintaan dipengaruhi dari beberapa lembaga yang dimanfaatkan oleh kader sejauh mana proses dikontrol.

Selain itu Rush dan Athoff (2018: 27) acuan dasar rekrutmen politik, berikut pola rekrutmen politik terbagi menjadi empat bagian yakni:

1. Partisanship, rekrutmen yang dilandaskan serta diarahkan guna mencari orang yang mempunyai loyalitas terhadap partai, maka dari itu perbedaan identitas (program atau kebijakan) di partai kepada partai lain menjadi begitu penting untuk pendukungnya.
2. Survival, rekrutmen dilandaskan serta diarahkan oleh orang yang mempunyai finansial serta massa. Itu selalu dilaksanakan dari partai saat menghadapi waktu pemilu.
3. Meritokratik, rekrutmen dilandaskan dan ditujukan kepada orang yang mempunyai keahlian serta kapasitas tertentu. Maka kompetensi itu menjadi ukuran penting.
4. Kompetentisme, rekrutmen dilandaskan keperluan penguatan departemen-departemen yang telah dianggap strategis kepada organisasi sisi-sisi kompetensi menjadi perhatian penting pada seleksi

Mengenai pandangan Athoff dan Rush (2018: 26) bentuk-bentuk maupun sistem rekrutmen politik mempunyai keberagaman yang banyak. Berbagai sistem rekrutmen dan rekrutmen politik yakni sebagai berikut:

1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan, ujian serta pelatihan adalah bentuk rekrutmen yang paling umum sering dilaksanakan guna mengisi posisi jabatan birokrasi dan administrasi, walaupun dilaksanakan pula dari partai, misalnya di Indonesia disebut pendidikan kader partai dilaksanakan melalui latihan. Maka mempunyai banyak keragaman dan berimplikasi penting untuk perekrutan politik.

2. Seleksi melalui penyortiran, sebuah metode tertua yang dilaksanakan guna memperkuat posisi pemimpin politik yaitu dengan penyortiran maupun penarikan undian, metode itu dulunya dipakai di Yunani Kuno.
3. Seleksi melalui rotasi atau giliran adalah metode yang sama dibentuk guna mengatasi dominasi jabatan serta posisi, kedudukan berkuasa dari orang maupun kelompok personal tertentu dengan giliran ataupun rotasi, sistem pilih kasih, Amerika Serikat dasarnya yaitu sebuah rekrutmen bergilir. Sejumlah negara lain sistem itu dilandaskan di ketentuan konstitusional, dibentuk guna menjamin kader rotasi personil eksekutif, dilaksanakan di sistem yang menggunakan format kepemimpinan kolektif ataupun pada bentuk presidium di masyarakat yang mempunyai kelompok politik yang kental agar menghindari persoalan serta menjaga stabilitas politik, baik partai politik maupun pemerintahan negara, tentu dibentuk sistem rotasi ataupun giliran.
4. Seleksi melalui perebutan kekuasaan, metode rekrutmen yang telah berjalan lama, terdapat pada sistem umum yakni sistem politik perebutan kekuasaan dengan cara menggunakan ancaman maupun kekerasan, faktornya nyata dari cara itu yakni pergantian para penguasa politik serta perubahan pada personil birokrasi, hal itu seringkali menimbulkan waktu yang lama, lebih khusus berlangsung di masyarakat yang sangat maju
5. Seleksi dengan cara patronage, yaitu sistem sampai sekarang masih dilaksanakan di negara berkembang, dulu sistem itu ada di Amerika

Serikat dan Inggris pada abad ke 19. Patronage adalah bagian sistem penyusunan serta korupsi yang rumit, memasuki kehidupan masyarakat di Inggris. Hal itu yakni metode cukup mapan guna mempengaruhi pelaksanaan otoritas politik melalui beberapa taraf kontrol kepada hasil pemilihan umum. Untuk sebagian yakni sarana untuk rekrutmen politik, sebab guna menjabat anggota legislatif serta dinas sipil sering menggunakan sistem patronage. Sebab perekrutan politik sistem itu tidak menjadi jaminan rekrutmen pemangku jabatan yang sesuai. Baik itu politik atau diukur kemampuannya.

6. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin yang alamiah, beda pada sistem patronage, yang cenderung mengekalkan tipe-tipe personil tertentu yakni sistem rekrutmen yang biasa disebut “bisa menghadirkan pemimpin-pemimpin yang alamiah”. Persoalan itu adalah membenaran kasar kepada penguasa aristokratis. Hal itu yakni faktor kontekstual vital dari sebagian besar sistem-sistem politik.
7. Seleksi melalui koopsi, koopsi merupakan metode lebih terbatas yaitu pemimpin-pemimpin yang bisa membantu pelaksanaan rekrutmen tipe-tipe pemimpin tertentu, Koopsi mencakup pemilihan individual dalam sebuah badan dari anggotanya.

2.2.3 Tinjauan Tentang Partai Politik

Menurut Budiardjo (2022: 19) partai Politik pertama kali hadir pada negara-negara Eropa Barat pada akhir abad ke 18 di Inggris dan Prancis, awal

mulanya agenda politik dikhususkan kepada kelompok-kelompok politik di Parlemen, agenda itu bersifat arsitokrat karena dalam rangka agar mempertahankan suku bangsawan dari desakan-desakan raja.

Almond (2019: 26) mengatakan partai politik sebagai organisasi manusia yang didalamnya ada pembagian tugas guna mendapatkan sebuah tujuan, memiliki ideologi, memiliki program politik sebagai pencapaian tujuan secara lebih pragmatis sesuai tahapan jangka pendek, jangka panjang dan memiliki khas kemauan agar berkuasa. Maka organisasi yang memenuhi kriteria bisa dimaksudkan serbagai partai politik.

Menurut Neuman (2019: 26) partai politik merupakan organisasi aktivis-aktivis politik yang berupaya guna menguasai otoritas pemerintahan dan merebut dukungan dari rakyat atas acuan persaingan dengan kelompok lain yang memiliki perpektif berbeda. Partai politik di Indonesia beserta aktivis politiknya berusaha keras agar meraih dukungan politik untuk partainya tersebut, dilandaskan dengan visi misi serta ideologi partai berbeda antara satu partai dengan partai lainnya.

Selanjutnya Budiardjo (2022: 20) membagi peran serta fungsi partai politik pada negara demokrasi dan berkembang. Partai politik di negara demokrasi melaksanakan peran dan fungsi parpol antara lain. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik sebagai sarana pengaturan konflik (conflict management).

Partai politik dalam Arifudin (2022: 16) penetapan Presiden RI No. 7 PNPS Tahun 1959. Partai Politik organisasi golongan rakyat berlandaskan persamaan keinginan dalam suatu negara untuk memperjuangkan secara bersama tujuan yang terstruktur pada bentuk negara. Menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1999. Partai politik merupakan organisasi dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela kesamaan keinginan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. Partai politik organisasi nasional dibuat oleh kelompok warga negara Indonesia, atas kehendak sendiri, berjuang membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, memelihara keutuhan NKRI berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang No. 2 Tentang Partai Politik. Undang-Undang ini sama dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 karena Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008. (Arifudin, 2022 halaman 17, dalam Pandangan Partai Politik Terhadap Pancasila Sebagai Etika Politik Di Kota Malang).

2.2.4 Tinjauan Tentang Pemilihan Umum

Pemilihan umum Dedi (2019: 3) yang membahas bahwa pemilihan umum adalah sebuah implementasi dari praktik sistem demokrasi di Indonesia. Sebagai warga negara ikut berpartisipasi dalam menentukan pilihannya siapa pemimpin suatu negara melalui tahapan pemilu politik yang dilakukan lewat kompetisi demokrasi negara.

Melalui fungsi Sanit (2019: 4) demokrasi diartikan sebagai predikat kehidupan yang baik, bentuk interaksi sosial atas interaksi kepentingan. Yaitu jujur, bebas merdeka, adil, persamaan, persaudaraan, berbagai hak individu dan sosial, demokrasi mengakar pada filsafat Yunani Kuno, dihidupkan dalam konstitusi Inggris, dicetuskan pada revolusi Perancis sampai Amerika Serikat agar disampaikan di Piagam PB, dijadikan kerangka kerangka bangsa dan negara dalam regulasi beberapa negara republik yang sistem demokrasi.

Dalam buku Pemilihan Umum Rudi (2018:1) pemilihan umum merupakan tahapan-tahapan untuk memilih seseorang agar mengisi posisi-posisi jabatan mulai dari pusat yakni Presiden, wakil rakyat tiap instansi pemerintahan dan kepala desa. Pemilihan umum adalah upaya agar mempengaruhi masyarakat tanpa ada unsur peaksaan melalui agenda retorika, komunikasi masa dan sebagainya.

Asshidiqie (2018: 3) yang memberikan pandangannya terkait pengertian pemilihan umum yaitu: Jimly Asshidiqie, Asshidiqie tentang pemilihan umum yakni cara yang dilaksanakan guna memilih para wakil-wakil rakyat melalui demokrasi, berawal atas konsep kedaulatan rakyat yaitu wakil-wakil yang menjabat di kursi parlemen dengan aturan yang biasa disebut perwakilan demokrasi.

Rudi (2018:14) pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Republik Indonesia. UU No. 3 Tahun 1999 terkait pemilihan umum saat orde baru yang memaparkan. “Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan

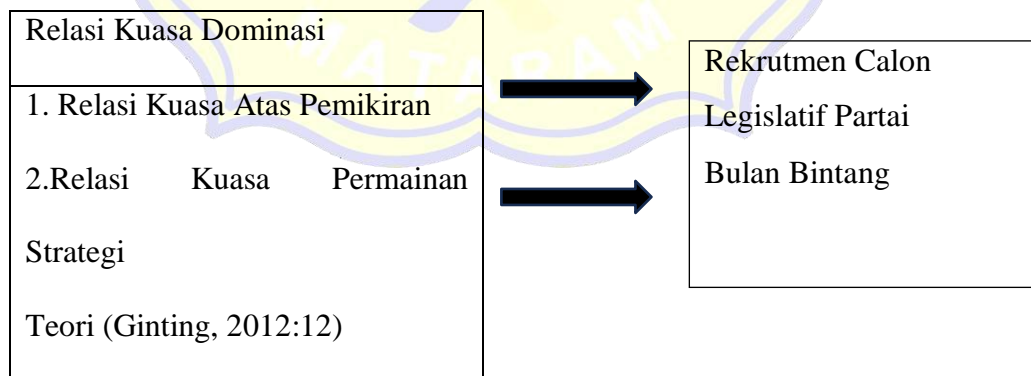
Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. *Ketujuh*, UU No. 12 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2003, UU No. 10 Tahun 2008, UU No. 42 Tahun 2008, UU No. 8 2012.

Rudi (2018: 14) Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 yang berbunyi. “Pemilihan umum biasa disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilaksanakan secara langsung, bebas, umum, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

2.3 Kerangka Berpikir

Selain itu, kerangka berpikir yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan acuan pemikiran pada penulisan. Oleh karena itu, penelitian dijelaskan dalam struktur berikut:

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Gambar 2.2 Bagan Kerangka Berpikir.

2.4 Definisi Konseptual

1. Relasi kuasa dominasi yaitu baik keadaan individu maupun kelompok memiliki keinginan untuk menguasai individu lain pada pemikiran, ide ataupun proses hidup kelompok lain, mereka akan menerima pikiran kelompok yang mendominasi, kelompok dominasi yaitu kelompok yang menganggap kuat serta bisa mengatur orang atau

kelompok lain sesuai keinginan melalui dominasi value sistem yang diciptakan. Dominasi yang berkembang di tengah masyarakat pada dasarnya ada dari berbagai rupa yang variatif, yakni seperti bentuk kebudayaan yang memaksa, sistem birokrasi, ilmu pengetahuan, ideologi serta filsafat, dominasi tersebut disadari maupun tidak telah mewujudkan disorientasi nilai, penyimpangan eksistensi, alineasi, budaya tunggal yang mematikan budaya pluralisme bahkan menghilangkan budaya minoritas, dominasi menetapkan seseorang di titik terendah pada nilai-nilai kemanusiaan, maka dominasi dalam pandangan teori kritis yaitu suatu kekuasaan yang lebih dominan hadir dari luar diri manusia. Tentu mempengaruhi serta turut mengatur seluruh kegiatan berpikir dan tingkah laku seseorang. Sementara manusia menerimanya tanpa dasar kesadaran yang utuh.

2. Relasi kuasa atas pikiran merupakan suatu cara terbaik agar kita bisa mendapatkan arti keseimbangan kekuasaan, antara wacana-wacana yang berkompetisi di titik pertautan tertentu. Dengan merefleksikan

dalam bahasa yang digunakan agar membicarakan sesuatu, sebab bahasa mampu mengidentifikasi bagaimana tubuh sering digunakan guna sebuah kepentingan, misalkan bahasa yang digunakan pada pelacuran biasa diasosiasikan terhadap perempuan, bahkan bahasa itu tidak digunakan sama terhadap laki-laki, maka pergeseran keseimbangan kekuasaan wacana antara definisi perempuan sangat massif di masa modern. Bahkan bisa mempengaruhi pikiran seseorang dalam menggolongkan manusia sesuai kelas sosial atau fisik, manusia digolongkan baik-buruk, benar-salah dilakukan atas wacana-wacana. Baik bahasa langsung maupun teks yang mendominasi sebuah waktu dalam sejarah serta suatu tempat di dunia sehingga manusia mempunyai kerangka pikir ataupun pandangan dengan dunia tertentu, maka dominasi yang sering diasupi dalam pikiran itu merubah cara pandang segala sesuatu. (Suyono, 2013:193).

3. Relasi kuasa sebagai permainan strategis adalah bagian yang merdeka. Pada ranah ini hanya melibatkan mereka yang mempunyai kebebasan, maka tidak mempunyai dominasi yang dilakukan pada relasi kuasa tersebut. Melainkan murni adanya permainan strategi, pola demikian kuasa akan menentukan relasi antar mitra di sebuah pendekatan tindakan yang dilakukan. (Edith Kurzweil, 2017:332-334).

2.5. Definisi Operasional

2.5.1 Relasi kuasa dominasi

i kuasa dominasi merupakan sebuah penguasaan oleh pihak yang mempunyai kekuatan lebih terhadap mereka yang lebih lemah. Maka dominasi antara kelompok bahkan individu bisa terjadi ketika suatu kelompok menguasai kelompok lain. Adanya relasi kuasa dominasi dari praktik yang dilakukan pihak partai adalah bentuk wujud nyata atas penerapan oleh pengurus partai yang memiliki kekuasaan, maka menciptakan dampak dari relasi kuasa dominasi sangat terbatas ruang gerak bagi yang tidak mempunyai kuasa dalam mendominasi kuasa.



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2014: 49) penelitiannya dengan tujuan agar membuat peristiwa secara sistematis, faktual serta akurat terkait fakta-fakta dan karakter populasi maupun daerah tertentu. Penelitian kualitatif yakni penelitian berdasarkan filsafat *postpositivisme* digunakan agar peneliti dianalisis data berkarakter induktif/kualitatif serta hasilnya lebih menonjol makna daripada generalisasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, kantor DPW PBB NTB dengan estimasi waktu penelitian selama satu bulan mulai pada tanggal 12 Mei sampai 20 Juni 2023, kemudian alasan lebih memilih Kota Mataram untuk lokasi penelitian, karena cara rekrutmen calon legislatif di tahun 2024 yang kurang efektif, dikarenakan rekrutmen calonnya masih menggunakan kerabat elit politik.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan jenis data kualitatif yakni data yang dimunculkan pada bentuk kata verbal, melainkan bukan angka, berdasarkan sumber data yang dipakai di penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

Pengertian data primer Sugishirono (2022: 25) yaitu data yang dikumpulkan secara langsung guna memberikan data terhadap pengumpul data. (Sugishirono, 2012: 225). Untuk sumber primer terdapat catatan wawancara yang didapatkan lewat wawancara oleh penulis. Selanjutnya penulis lakukan observasi lapangan serta kumpulkan data melalui catatan terkait situasi dan kejadian.

Lalu pe nulis akan menjelaskan terkait data primer diatas melalui tabel dibawah ini yakni sebagai berikut:

Tabel 3.1 Unit Analisa Data Primer

No.	Variabel	Indikator	Data Primer
1.	Relasi Kuasa Dominasi	1. Relasi Kuasa Pemikiran	1. Apakah saat rekrutmen calon, kriteria penilain caleg dari partai menilainya dari segi ide serta wacana? 2. Apakah ada dominasi ide/wacana dari partai

2.	Relasi Kuasa Dominasi	2. Relasi Kuasa Permainan Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah ada permainan strategi oleh partai saat melakukan rekrutmen terhadap para caleg? 2. Apakah dominasi partai terhadap Caleg dari segi strategi
----	-----------------------	------------------------------------	---

4. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung memberikan informasi terhadap peneliti. Sumber ini adalah hasil lebih lanjut dari data primer yang disajikan oleh orang lain. Maka data ini diguna agar mendukung informasi pada data primer yang didapatkan baik berupa wawancara atau observasi langsung. Data sekunder digunakan penulis dari literatur, penelitian pustaka, yakni sebagai faktor pendukung penelitiannya. Handika (2022: 25)

Kemudian peneliti akan membahas secara rinci dalam bentuk tabel tentang data skunder yakni diantaranya:

Tabel 3.2 Analisi Data Skunder

No.	Variabel	Indikator	Data
1.	Relasi Kuasa Dominasi	1. Relasi Kuasa Pemikiran	1. AD/ART 2. Data Caleg 3. Kartu Anggota
2.	Relasi Kuasa Dominasi	2. Relasi Kuasa Permainan Strategi	1. Pedoman strategi 2. Panduan strategi

3.4 Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian ini menggunakan *proposie sampling* agar pemilihan subyek penelitian mengkhususkan terhadap subyek yang sama dengan proposive maupun tujuan penelitian ini. Ada beberapa narasumber dari penelitian ini yakni sebagai berikut:

Tabel 3.3 Data Narasumber Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Zulkarnain, SE., MM	Bendahara DPW PBB NTB
2.	Asmadi, SP	Sekretaris Pemuda PBB NTB
3.	M. Febrian Maulana Wahyudi	Masyarakat
4.	Nardi Saputra	Masyarakat

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data yang dilakukan oleh penulis yaitu menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi, berikut tahapan pengumpulan data yakni antara lain:

1. Wawancara

Wawancara menurut Moloeng (2014: 50) merupakan komunikasi dengan maksud tertentu dengan melibatkan antara dua pihak pewawancara dengan terwawancara. Menurut Patton wawancara terbagi tiga bagian dilandaskan perencanaan pertanyaan, wawancara pendekatan informal, pendekatan digunakan petunjuk umum wawancara dan wawancara baku terbuka, Penelitian ini menggunakan wawancara jenis yang kedua, yaitu wawancara terstruktur atas pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah metode atau cara agar menganalisis serta melakukan pencatatan secara sistematis, bukan hanya membatasi pada orang melainkan obyek-obyek alam lain. (Sugiyono, 2010).

Penelitian kualitatif terkait teknik pengumpulan data dengan cara observasi sangat dibutuhkan, metode observasi pada penelitian kualitatif yaitu memungkinkan melihat serta mengamati sendiri peristiwa yang terjadi saat penelitian. Selain itu mencatat apa yang terjadi sebagaimana kenyataannya. Meleong (2014: 174).

3. Dokumentasi

Moloeng (2014: 50) Dokumentasi adalah dengan menggunakan dengan cara tertulis ataupun film. Dokumentasi terbagi menjadi dua, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi, dokumen itu akan dijadikan sumber data guna menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data yang diambil pada penulisan karya ilmiah, menggunakan analisis data kualitatif serta menganalisis dan berusaha merefleksikan cara rekrutmen calon legislatif Partai Bulan Bintang di tahun 2019 dan 2024 mendatang, pada pemilihan legislatif agar mengetahui keefektifan proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan Partai Bulan Bintang bagi siapa yang akan direkomendasikan, apakah rekomendasinya dengan sistem relasi kuasa secara kerabat kekeluargaan atau seperti apa.

Berikut Miles dan Huberman (2020: 163) uraian analisis dapat terbagi menjadi tiga bagian yakni diantaranya , *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan terakhir, penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data Azni (2014: 25) dibutuhkan sebagai langkah awal dalam menganalisis data pada penelitian kualitatif sebab dimungkinkan data yang didapatkan peneliti atas hasil wawancara dan dokumentasi, mereduksi berarti memilih hal-hal inti serta merangkum. Maka data yang

direduksi bisa memberikan kejelasan dan memudahkan peneliti melaksanakan pengumpulan data berikutnya walaupun dibutuhkan.

2. Penyajian Data

Sugiyono (2014: 54) ketika sudah melakukan reduksi data, tentu data yang didapatkan lalu disajikan (display data), penelitian kualitatif, display data bisa dilaksanakan agar mempermudah dalam memahami apa yang sedang terjadi. Perencanaan kerja selanjutnya berlandaskan apa yang sudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan Azni (2014: 54) merupakan tahapan akhir yang dilakukan pada teknis analisis data. Kesimpulan bersifat sementara dan bisa diubah walaupun tidak mendapatkan bukti yang kuat sebagai pendukung dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Ketika kesimpulan yang dikemukakan pada penelitian awal sesuai dengan bukti-bukti valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulannya bersifat kredibel.

